



Kampung KB di Jogja Jadi Garda Pembangunan Kesejahteraan



Youtube Harian Jogja
Kepala DP3AP2KB Jogja, Edy Muhammad (kanan) saat menjadi narasumber dalam talk show bertajuk Peran Kampung KB di Kota Jogja, Kamis (29/9).

Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang sudah tersebar di seluruh kelurahan di Jogja menjadi faktor penting pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Kampung KB, pembangunan berbasis unit terkecil keluarga jadi lebih matang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jogja Edy Muhammad mengatakan hingga kini, sudah ada 45 kampung KB di Jogja.

Edy menyebut kampung KB dapat mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada pada tingkat keluarga.

"Dari angka *stunting* hingga kekerasan jalanan [rasjal] dapat teratasi dengan kampung KB yang memang dibuat terintegrasi dengan berbagai lembaga ini," kata Edy dalam *talk show* yang digelar Harian Jogja bekerja sama dengan DP3AP2KB Jogja bertajuk *Peran Kampung KB di Kota Jogja*, Kamis (29/9).

Edy menjelaskan kampung KB diarahkan jadi setingkat kelurahan yang dulunya berbasis RW. "Perubahan ini untuk lebih mengintegrasikan kampung KB dengan kelurahan, agar geraknya

lebih masif," ujarnya.

Di lingkup kelurahan, kata Edy, akan menciptakan kader-kader Kampung KB yang bisa bergerak lebih leluasa.

"Jadi nanti berbagai kegiatan dan fasilitasi bisa dilakukan kader kampung KB lebih luas, misalnya menyediakan konseling psikologis, edukasi *stunting*, sampai pencegahan rasjal," kata dia.

Dengan begitu, kampung KB tak hanya mengurus penggunaan kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran.

"Masalah keluarga kan tidak hanya kontrasepsi, semuanya harus ditangani. Maka dari itu, kampung KB hadir dan terintegrasi dengan berbagai lembaga agar koordinasinya bisa luas dalam mengatasi masalah," jelas Edy.

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta, Dhian Novitasari mengapresiasi kehadiran kampung KB. "Kami bisa pastikan anggaran-anggaran kampung KB saat pembahasan anggaran Pemkot dan DPRD tak terpotong karena program tersebut bagus," katanya.

Dhian menilai kampung KB bisa jadi garda terdepan untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan.

"Tetapi tantangannya memang mengajak masyarakat itu, memang

harus lebih giat untuk mendukung dan membangun kesadarannya," kata dia.

Instruksi Presiden (Inpres) No.3/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, menurut Dhian, bisa jadi payung hukum penyelenggaraan program KB.

"Di Inpres tersebut diatur memang kampung KB dilakukan pada tingkatan kelurahan dan kami mendukungnya," ucapnya.

Tantangan

Ketua Kampung KB Prawirodirjan, Utami Wulandari mengakui kini merasa lebih leluasa menggerakkan kader-kadernya ketika kampung KB ditingkatkan ke kelurahan. "Kami juga jadi bisa ikut mengusulkan program dan anggarannya saat Musrenbang, jadi lebih efektif bantuan dan dukungan pemerintah," jelasnya.

Tantangan utama kampung KB, jelas Utami, adalah membangun kesadaran masyarakat.

Utami menilai selama ini Pemkot Jogja, terutama DP3AP2KB sudah sangat membantu dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kampung KB. "Sekarang tinggal bagaimana pengurus KB sendiri karena dukungan selalu tersedia," katanya. (Adv)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005